

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN PENYANDANG *DISABILITAS* MELALUI PENGEMBANGAN INDUSTRI KREATIF “*LIMBAH SINGKONG*” DI KABUPATEN PONOROGO

Ika Susilawati¹

Email: ika.susilawati79@gmail.com

ABSTRACT

Ponorogo is a district that has the most poor community with disabilities in East Java. The existence of community with disabilities are on two important points, namely Jambon sub-district and Balong sub-district that reached 1,505 people. And of course, their condition is still very far from the standard of economic welfare. Therefore, it seems very urgent to do community empowerment with disabilities in Ponorogo in order to improve their economic welfare. This empowerment is implemented using the principles of emancipatory approach to doing community organizations through adult education (andragogy) using participatory method in community-based research (CBR). This approach emphasized the active role of the community in planning, implementation, and evaluation of research results. This program was conducted for 4 days, on October 24 to 27 until October 27, 2015, which including entrepreneurial motivation, training, manufacture of food products from cassava waste and food from cassava, and the training of financial reporting for UKM production, spiritual motivation of scholars. the follow up of empowerment activities is the establishment of a business group with the name of "Mandiri Sejahtera" in cooperation with various parties that supporting the production of marketers. The factors that pushed towards success in community empowerment with disabilities in Ponorogo were the attitude of openness towards others, and the support and participation of all stakeholders. The inhibiting factors were the traditional public attitudes and dependence. During this time, the community with disabilities in Ponorogo often got help from outside consumptive. So, this caused the community less independent and inflicting dependence on others.

Keywords: *Empowerment, Poor Community, Disabilities, and Cassava Waste*

A. PENDAHULUAN

Salah satu problema yang sangat penting yang dihadapi negara-negara di dunia terutama negara-negara yang sedang berkembang adalah bagaimana memerangi kemiskinan. Di negara-negara sedang berkembang, pada umumnya upaya pengentasan kemiskinan dilakukan dengan pembangunan yang bertumpu pada pertumbuhan ekonomi. Dengan asumsi bahwa pertumbuhan *output* nasional atau *Gross National Product* (GNP)

¹ Dosen Prodi Ekonomi Islam Jurusan Syariah STAIN Ponorogo.

dapat mendorong kegiatan ekonomi lainnya, yang pada gilirannya menciptakan lebih banyak lapangan kerja dan peluang usaha.

Asumsi tersebut banyak di negara-negara berkembang tidak terwujud menciptakan kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Strategi pembangunan yang bertumpu pada pertumbuhan ekonomi tidak dengan sendirinya membawa peningkatan standar hidup masyarakat secara keseluruhan maupun individu. Hal ini disebabkan oleh dua alasan. Pertama; umumnya pertumbuhan penduduk di negara berkembang lebih besar daripada pertumbuhan ekonomi sehingga secara komparatif tidak memberikan peningkatan taraf hidup secara signifikan. Kedua; adanya ketidakadilan dan struktur ekonomi yang tidak berpihak kepada kaum miskin, membuat *output* pertumbuhan tersebut tidak terdistribusi secara merata.² Hal yang sama juga diungkapkan oleh Todaro, yang mengatakan bahwa “setinggi apa pun tingkat pendapatan nasional per kapita yang dicapai oleh suatu negara, selama distribusi pendapatan yang tidak merata, maka tingkat kemiskinan di negara tersebut akan tetap parah”.³

Menurut BPS dan Kompas, dari tahun 2014 ke tahun 2015 jumlah kemiskinan semakin bertambah. Pada bulan Maret 2015, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Indonesia mencapai 28,59 juta orang (11,22 persen), bertambah sebesar 0,86 juta orang dibandingkan dengan kondisi September 2014 yang sebesar 27,73 juta orang (10,96 persen). Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada September 2014 sebesar 8,16 persen, naik menjadi 8,29 persen pada Maret 2015. Sementara persentase penduduk miskin di daerah perdesaan naik dari 13,76 persen pada September 2014 menjadi 14,21 persen pada Maret 2015. Berdasarkan fakta yang dikemukakan oleh BPS tersebut sangat jelas memberikan bukti bahwa kesejahteraan masyarakat masih jauh dari harapan, apalagi masyarakat lemah seperti penyandang cacat.

Masalah kemiskinan seharusnya tidak hanya didefinisikan dari perspektif ekonomi saja, tetapi juga aspek sosial seperti keluarga dengan penyandang *disabilitas*. Penyandang *disabilitas* Indonesia hingga saat ini diperkirakan mencapai 11 juta jiwa. Sayangnya, mereka masih saja mengalami berbagai diskriminasi dalam pemenuhan haknya. Kehadiran negara masih kurang dalam memberikan jaminan dan perlindungan bagi penyandang *disabilitas*. Hal ini terlihat dengan masih adanya diskriminasi yang dialami *difabel* dalam memanfaatkan

² Felix Adam, (Online), <http://www.pu.go.id/P2KP/2006>.

³ M. P. Todaro, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, Edisi VI (Jakarta: Erlangga, Jakarta, 1999), 146.

berbagai layanan publik dan pemenuhan hak-haknya. Berdasarkan hasil pendataan/survey jumlah penyandang cacat pada 9 provinsi sebanyak 299.203 jiwa dan 10,5% (31.327 jiwa) merupakan penyandang cacat berat yang mengalami hambatan dalam kegiatan sehari-hari (*activity daily living/ADL*). Sekitar 67,33% penyandang cacat dewasa tidak mempunyai keterampilan dan pekerjaan. Jenis keterampilan utama penyandang cacat adalah pijat, pertukangan, petani, buruh dan jasa. Jumlah penyandang cacat laki-laki lebih banyak dari perempuan sebesar 57,96%. Jumlah penyandang cacat tertinggi ada di Provinsi Jawa Barat (50,90%) dan terendah ada di Provinsi Gorontalo (1,65%). Dari kelompok umur, usia 18-60 tahun menempati posisi tertinggi. Kecacatan yang paling banyak dialami adalah cacat kaki (21,86%), mental retardasi (15,41%) dan bicara (13,08%).

Ponorogo adalah kabupaten yang memiliki masyarakat miskin penyandang *disabilitas* terbanyak di Jawa Timur, yang berada di dua titik penting *disabilitas* yaitu kecamatan Jambon dan kecamatan Balong berjumlah 1.505 orang, yang mengalami kemiskinan super parah. Kecamatan Jambon, terdiri dari 13 desa yaitu desa Krebet, desa Jonggol, desa Poko, desa Jambon, desa Blembem, desa Pulosari, desa Bringinan, desa Sendang, desa Karanglokidul, desa Bululor, desa Menang, desa Srandil, dan desa Sidoharjo. Masyarakat miskin penyandang *disabilitas* di kecamatan ini berjumlah 487 orang, terdiri dari Tuna netra 38 orang, Tuna Rungu 57 orang, Tuna wicara 60 orang, Tuna Rungu Wicara 21 orang, Tuna daksa 62 orang, Tuna Grahita 21 orang, Cacat mental 177 orang dan Cacat ganda 51 orang.⁴

Kecamatan Balong terdiri dari 20 desa yaitu desa pandak, desa Bulukidul, desa Bulak, desa Ngendut, desa Karangpatihan, desa Sumberejo, desa Ngumpul, desa Ngraket, desa Dadapan, desa Singkil, desa Karang, desa Bajang, desa Balong, desa Jalen, desa Karangmojo, desa Sedarat, desa Purworejo, desa Tatung, desa Muneng, desa Ngampel. Masyarakat miskin penyandang *disabilitas* kecamatan ini berjumlah 1.018 orang, terdiri dari Tuna netra 87 orang, Tuna Rungu wicara 202 orang, Tuna Daksa 93 orang, Tuna Grahita 41 orang, dan Cacat lainnya 595 orang.⁵

Masyarakat penyandang *disabilitas* dari kedua kecamatan tersebut, mayoritas berada di daerah lereng pegunungan seperti Krebet, Sidoharjo, Karangpatihan dan Pandak. Kondisi geografis dari beberapa desa tersebut sama, yaitu sulit diakses, berada di lereng gunung, tanah berkapur yang sulit ditanami, terpencil, akses transportasi sulit, makanan sehari-hari *tiwul* (singkong yang dikeringkan), miskin dan berpendidikan rendah, dan mayoritas

⁴ BPS Kabupaten Ponorogo tahun 2014.

⁵ Ibid.

warganya berkerja menjadi buruh tani/buruh bangunan. Daerah ini cukup sulit diakses oleh pendatang. Hanya ada satu jalan utama setelah melewati sawah-sawah dan hutan. Jalan menyempit saat memasuki dukuh tersebut. Umumnya, jalanan terbagi tiga tipe. Aspal, makadam, serta tanah dengan berbagai tanjakan dan turunan khas daerah pegunungan. Jalan hanya mampu ditaklukkan oleh roda dua. Namun, semua kendaraan dipastikan lumpuh saat hujan turun karena akses jalan menuju perbukitan masih berupa tanah liat.

Begitu banyak warga yang mengalami keterbelakangan mental di daerah ini. Namun demikian pola interaksi mereka tidak jauh berbeda dengan kehidupan manusia normal. Penderita keterbelakangan mental yang bisa bekerja diarahkan untuk membantu orang tua. Mereka yang tidak bisa diajari apa pun dibiarkan begitu saja berkeliaran di perkampungan. Karena tidak ada satu pun yang bertipe menyerang, warga tidak pernah merasa terganggu. Sisi perekonomian jelas tidak bisa dibanggakan. Sebagai buruh tani, bisa jadi penghasilan mereka Rp 100 ribu-Rp 300 ribu per bulan. Dengan rendahnya penghasilan ditambah lagi keluarga yang rata-rata mempunyai anak lebih dari dua, ujung-ujungnya warga tidak bisa mengonsumsi makanan bergizi secara cukup.

Kondisi ini sudah berlangsung puluhan tahun. Jumlahnya yang sangat banyak serta adanya pertalian darah antara satu penderita dengan penderita lain, membuat banyak orang menyebutnya sebagai kampung idiot. Di mana-mana selalu ada orang idiot. Selain kondisi ekonomi rendah, kasus penderita keterbelakangan mental ini juga disebabkan oleh kekurangan asupan gizi. Sebagian media ada yang menyebutkan bahwa perkawinan sedarah turut menjadi penyebab kasus ini. Namun menurut keterangan dari kepala desa Kreet, tidak ada satu pun warga yang melakukan perkawinan sedarah.⁶

Mayoritas warga idiot ini berusia 40 tahun ke atas. Sebagian lain berusia antara 30-40 tahun, dan sebagian kecil lagi adalah usia balita hingga dewasa. Dari penelitian yang dilakukan oleh Akademi Gizi Kediri dan Dinas Pengairan setempat, ditemukan bahwa sumber air yang ada di Desa Sidoharjo, Kreet dan lainnya terdapat pada kedalaman 27 km di bawah permukaan tanah mengandung logam berat yang sangat membahayakan tubuh dan sama sekali tidak mengandung yodium. Kondisi inilah yang menyebabkan keterbelakangan mental pada penderita dengan usia 40 tahun ke atas. Sedangkan untuk usia remaja dan anak-anak, keterbelakangan mental disebabkan karena sewaktu dalam kandungan, sang ibu sama sekali tidak pernah memeriksakan kehamilannya akibat tingkat kesadaran yang rendah akan kesehatan dan jauhnya jarak menuju tenaga medis ataupun pos kesehatan.

⁶ Jemiran, *Wawancara*, Kreet, 10 September 2015.

Fenomena 'Kampung Idiot' ini telah menjadi buah bibir beberapa waktu lalu baik di media cetak ataupun elektronik, dan memang diharapkan dari tayangan di media-media tersebut bisa menarik bantuan dari pihak lainnya yang tergerak hatinya. Sebenarnya telah ada upaya bantuan baik dari pemerintah ataupun dari orang-orang yang terketuk hatinya untuk segera membantu penduduk idiot di desa ini, namun masih dirasa kurang. Adapun bantuan yang pernah diperoleh warga di kampung idiot ini antara lain:

1. Raskin.
2. Jamkesmas dan pelayanan kesehatan khusus (bagi masyarakat miskin yang belum memperoleh jamkesmas).
3. Pemberian garam beryodium oleh Bupati Ponorogo untuk mengantisipasi Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY).
4. Pembuatan 4 titik pipanisasi sumber air di hutan untuk memenuhi kebutuhan warga akan air yang bersih dan sehat.
5. Pembangunan jaringan listrik tenaga surya oleh Dinas Pekerjaan Umum.
6. Bantuan berupa uang, bahan makanan, dan pakaian baik dari pemerintah maupun perorangan.

Kondisi penyandang keterbelakangan mental dan cacat di kampung idiot ini sangat memprihatinkan. Tidak jarang di antara mereka yang makan nasi tiwul yang terbuat dari singkong, bahkan nasi tiwul yang mereka konsumsi bisa berupa nasi tiwul yang telah mereka tanak berulang-ulang. Jika dalam satu hari tiwul yang dimasak tidak habis, besoknya akan dijemur dan dimasak lagi. Mereka makan nasi hanya pada saat ada pengedropan beras raskin. Cara memasak nasi pun tetap dengan mencampur nasi dengan tiwul, dengan perbandingan antara beras : tiwul = 1:3. Bayangkan dalam 1 bulan, mungkin hanya 5 kg beras yang bisa dimakan oleh beberapa orang dalam 1 keluarga. Karena alasan pemerataan, perangkat desa melakukan gebyah uyah. Jatah beras per KK yang seharusnya 15 kg berkurang menjadi hanya 5 kg per bulan. *Disabilitas* merupakan permasalahan psikologis yang berkaitan erat dengan berbagai aspek kehidupan baik sosial maupun ekonomi. Kondisi yang sangat memprihatinkan terlebih ketika banyak yang menganggap para penyandang disabilitas tersebut sebagai beban karena kehidupan mereka masih sangat bergantung pada penduduk normal yang ada di sekitarnya.

Melihat kondisi masyarakat penyandang *disabilitas* di Kabupaten Ponorogo yang demikian parah, maka tentunya masih sangat jauh dari standar kesejahteraan ekonomi.

Kesejahteraan ekonomi, menurut Menteri Kesejahteraan Rakyat, sejahtera adalah suatu kondisi ekonomi masyarakat yang telah terpenuhi kebutuhan dasarnya. Kebutuhan dasar di sini mengacu pada kecukupan dan mutu pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, lapangan pekerjaan. Juga terpenuhinya hak asasi dan partisipasi serta terwujudnya masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.⁷

Oleh karena itu, kiranya sangatlah urgen untuk melakukan pemberdayaan masyarakat penyandang *disabilitas* di Kabupaten Ponorogo dalam rangka peningkatan kesejahteraan ekonomi mereka. Peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat miskin penyandang *disabilitas* ini mengacu pada peningkatan sumber daya manusia berupa peningkatan keterampilan hidup (*life skill*), bentuk peningkatan ketrampilan hidup ini bisa berupa pemberian latihan kerja, latihan ketrampilan, kursus dan lain-lain. Sehingga masyarakat miskin penyandang *disabilitas* tersebut dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dengan lebih baik. Peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat penyandang disabilitas tersebut kami kemas dalam program pengabdian masyarakat.

B. PEMBAHASAN

1. Metode Partisipatif (*Participatory Method*) dalam Pendekatan Community Based Research (CBR)

Berdasarkan studi pendahuluan mengenai masalah utama (*core problem*) seperti yang teridentifikasi pada fokus program di atas, maka strategi yang digunakan sesuai dengan prinsip *emancipatory* yang melakukan pengorganisasian masyarakat melalui pendidikan orang dewasa (*andragogi*) dengan memakai metode partisipatif (*participatory method*) dalam *community based research (CBR)*. Pendekatan ini menitik beratkan peran aktif komunitas dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi hasil riset. Masyarakat miskin penyandang *disabilitas* merupakan aktor utama (*main actor*), sedangkan Tim dari STAIN Ponorogo tidak lebih dari sekedar “pendamping” yang semaksimal mungkin berusaha untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi. Masyarakat miskin penyandang *disabilitas* yang menjadi subjek pemberdayaan inilah yang akan memetakan, merumuskan masalah, membuat rencana tindak, melaksanakan program kegiatan, memantau dan mengevaluasi setiap implementasi program. Pada setiap tahapan proses tersebut, Tim pendamping juga berusaha membangun suasana dan menciptakan iklim kondusif, memberi berbagai masukan

⁷ <http://www.kemeninkom.co.id>.

(*input*) meningkatkan kapasitas, membuka akses ke berbagai jejaring kerja, peluang dan kesempatan yang ada di luar masyarakat miskin desa tertinggal.

Untuk mencapai sasaran di atas, dilakukan beberapa kegiatan sebagai berikut:

- a. Kegiatan pemetaan (*mapping*) potensi, permasalahan, tantangan masyarakat miskin penyandang *disabilitas*. Kegiatan pemetaan merupakan tindak lanjut dari riset pendahuluan (*preliminary research*) yang telah dilakukan oleh tim peneliti. Kegiatan pemetaan pada dasarnya dilakukan oleh masyarakat miskin penyandang *disabilitas* 'sendiri'. Dalam kegiatan ini, melalui metode *Participatory Rapid Appraisal* (PRA) seluruh *stakeholder* masyarakat didampingi untuk melakukan *survey lingkungan sendiri* (*Environment self survey*). Tujuan kegiatan ini adalah untuk mendapatkan gambaran yang *relative* utuh dan objektif tentang peta dasar kebutuhan, potensi dan permasalahan yang dihadapi masyarakat terkait pemberdayaan masyarakat miskin penyandang *disabilitas*. Satu hal yang sangat penting mengingat paradigma pembangunan yang bertumpu pada komunitas (*community based development*) memerlukan kesadaran akan adanya masalah bersama yang harus dipecahkan secara bersama pula/luaran (*output*) yang diharapkan dari kegiatan tersebut adalah dihasilkannya peta permasalahan, kebutuhan dan potensi masyarakat terkait dengan kemiskinan masyarakat Indonesia.
- b. Penyusunan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat miskin penyandang *disabilitas* yang dilakukan dan dihadiri oleh masyarakat miskin, *stakeholder* dan pemerintah. Rencana tindakan tersebut memuat identifikasi permasalahan masyarakat miskin, strategi penanggulangan pemecahan masalah, pengembangan berbagai pilihan tindak/kegiatan, rencana implementasi, dan kegiatan monitoring/evaluasi. Kegiatan tersebut dilakukan dalam sebuah forum lokakarya atau rapat kerja yang dihadiri oleh berbagai *stakeholders* yang didampingi oleh tim peneliti.
- c. Kegiatan pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan kemampuan (*capacity*) dan kompetensi masyarakat miskin dilakukan. Materi pelatihan disesuaikan dengan hasil identifikasi kebutuhan keterampilan dan manajemen teknis yang berhasil diidentifikasi pada kegiatan sebelumnya, terutama berkaitan dengan masalah pengorganisasian masyarakat, pengembangan program, manajemen keuangan, manajemen pendidikan dan strategi pendampingan. Kegiatan ini

merupakan bagian dari proses penyiapan *Support Group*/kelompok pendukung yang dilakukan oleh tim peneliti, sehingga diharapkan mereka mampu melaksanakan program-program yang telah dicanangkan dalam rencana penyelenggaraan pengembangan industri kreatif “limbah ketela” berbasis komunitas yang telah disusun.

- d. Kegiatan penguatan jaringan pengelolaan “limbah ketela” dengan dunia usaha, pemerintah dan instansi serta lembaga terkait lainnya. Kegiatan ini melibatkan seluruh stakeholder, kalangan usaha, pemerintah, media cetak dan elektronik serta beberapa pihak lain yang diharapkan dapat memfasilitasi terwujudnya media jaringan yang dapat memperkuat jaringan kerja (*networking*) dan kekuatan tawar (*bargaining position*).

2. Pemberdayaan Masyarakat dengan Pendekatan Community Based Research (CBR)

a. Pengertian Pemberdayaan

Pemberdayaan diambil dari sebuah terjemah kata dalam bahasa Inggris, yakni *empowerment*, yang mempunyai makna dasar ‘pemberdayaan’, ‘daya’ bermakna kekuatan (*power*). Bryant dan White menyatakan pemberdayaan sebagai upaya menumbuhkan kekuasaan dan wewenang yang lebih besar kepada masyarakat miskin, dengan cara menciptakan mekanisme dari dalam (*build-in*) untuk meluruskan keputusan-keputusan alokasi yang adil, yakni dengan menjadikan rakyat mempunyai pengaruh. Sementara Freire, menyatakan *empowerment* bukan sekedar memberikan kesempatan rakyat menggunakan sumber daya dan biaya pembangunan saja, tetapi juga upaya untuk mendorong mencari cara menciptakan kebebasan dari struktur yang opresif.⁸

Pengertian dan Indikator Pemberdayaan:

- 1) Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung.⁹
- 2) Pemberdayaan menunjuk pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui pengubahan struktur social.¹⁰
- 3) Pemberdayaan adalah suatu cara dengan mana rakyat, organisasi, dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai (atau berkuasa atas) kehidupannya.¹¹

⁸ <http://www.pemberdayaan.com/pemberdayaan/konsep-pemberdayaan-membantu-masyarakat-agar-bisa-menolong-diri-sendiri.html#more-82>, diakses 15 Agustus 2010.

⁹ Jim Ife, *Community Development: Creating Community Alternatives, Vision Analysis and Practice* (Australia : Longman, 1995), 56.

¹⁰ Swift C. & G. Levin, "Empowerment: An Emerging Mental Health Technology", *Journal of Primary Prevention* (USA: t.p., 1987), xiii.

- 4) Pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam, berbagi pengontrolan atas, dan mempengaruhi terhadap, kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya.¹²
- 5) Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah, untuk: (a) memiliki akses terhadap sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-baran dan jasa-jasa yang mereka perlukan; dan (b) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.

b. Konsep Pemberdayaan

Konsep pemberdayaan mencakup pengertian pembangunan masyarakat (*community development*) dan pembangunan yang bertumpu pada masyarakat (*community based development*). Pemberdayaan masyarakat sebenarnya adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi dan politik yang merangkum berbagai nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat “*people centered, participatory, empowering, and a sustainable*”. Dalam konsep pemberdayaan, masyarakat dipandang sebagai subyek yang dapat melakukan perubahan, oleh karena diperlukan pendekatan yang lebih dikenal dengan singkatan ACTORS.¹³

- 1) *Authority* atau wewenang pemberdayaan dilakukan dengan memberikan kepercayaan kepada masyarakat untuk melakukan perubahan yang mengarah pada perbaikan kualitas dan taraf hidup mereka.
- 2) *Confidence and competence* atau rasa percaya diri dan kemampuan diri, pemberdayaan dapat diawali dengan menimbulkan dan memupuk rasa percaya diri serta melihat kemampuan bahwa masyarakat sendiri dapat melakukan perubahan.
- 3) *Truth* atau keyakinan, untuk dapat berdaya, masyarakat atau seseorang harus yakin bahwa dirinya memiliki potensi untuk dikembangkan.

¹¹ J. Rappaport, *Studies in Empowerment: Introduction to the Issue*, Prevention In Human Issue (USA: t.p., 1984), 3.

¹² Ruth J. Parsons, James D. Jorgensen and Santos H. Hernandez, *The Integration of Social Work Practice* (California: Wadsworth Inc, 1994), 106.

¹³ <http://www.pemberdayaan.com/etccetera/energi-sosial-budaya-dan-lokalitas-titik-fokus-konsep-pemberdayaan.html#more-86>, diakses 10 Agustus 2010.

- 4) *Opportunity* atau kesempatan, yakni memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memilih segala sesuatu yang mereka inginkan sehingga dapat mengembangkan diri sesuai dengan potensi yang mereka miliki.
- 5) *Responsibility* atau tanggung jawab, maksudnya yaitu perlu ditekankan adanya rasa tanggung jawab pada masyarakat terhadap perubahan yang dilakukan.
- 6) *Support* atau dukungan, adanya dukungan dari berbagai pihak agar proses perubahan dan pemberdayaan dapat menjadikan masyarakat 'lebih baik'.

c. Pendekatan Pemberdayaan

Dalam konteks pekerjaan sosial, pemberdayaan dapat dilakukan melalui tiga pendekatan:

- 1) Pendekatan Mikro. Pemberdayaan dilakukan terhadap klien secara individu melalui bimbingan, konseling, *stress management*, *crisis intervention*. Tujuan utamanya adalah membimbing atau melatih klien dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya. Model ini sering disebut sebagai pendekatan yang berpusat pada tugas (*Task Centered Approach*).
- 2) Pendekatan Mezzo. Pemberdayaan dilakukan terhadap sekelompok klien. Pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan kelompok sebagai media intervensi. Pendidikan dan pelatihan, dinamika kelompok, biasanya digunakan sebagai strategi dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan, keterampilan dan sikap-sikap klien agar memiliki kemampuan memecahkan permasalahan yang dihadapinya.
- 3) Pendekatan Makro. Pendekatan ini disebut juga sebagai Strategi Sistem Besar (*Large System Strategy*), karena sasaran perubahan diarahkan pada sistem lingkungan yang lebih luas. Perumusan kebijakan, perencanaan sosial, kampanye, aksi sosial, *lobbying*, pengorganisasian masyarakat, manajemen konflik, adalah beberapa strategi dalam pendekatan ini. Pendekatan ini memandang klien sebagai orang yang memiliki kompetensi untuk memahami situasi-situasi mereka sendiri, dan untuk memilih serta menentukan strategi yang tepat untuk bertindak.

d. Pemberdayaan Masyarakat Penyandang Disabilitas

Ada dua pendekatan yang selama ini digunakan untuk melakukan pemberdayaan pada penyandang cacat, yakni:

1) Model Medis

Model medis menganggap kecacatan sebagai suatu abnormalitas, sehingga orang yang mengalami kecacatan harus dinormalkan, dikoreksi, ditanggulangi dan disembuhkan, sehingga hambatan yang mereka hadapi di masyarakat dapat diatasi, dan pemberdayaan penyandang cacat tersebut bisa berjalan.

2) Model sosial

Model Sosial disusun berdasarkan pemahaman bahwa penyatuan diri penyandang cacat diartikan sebagai proses merobohkan rintangan-rintangan dan menjinakkan ranjau-ranjau sosial. Model ini menekankan aspek perubahan sikap masyarakat terhadap penyandang cacat yang menghambat kemandirian dan pengembangan dirinya.

Berdasarkan permasalahan penyandang cacat di atas, maka dua model ini sesungguhnya sangat tepat untuk dikolaborasikan. Konsep pemberdayaan ini dikenal dengan Pemberdayaan Berbasis Masyarakat. Dalam konsep pemberdayaan berbasis masyarakat, tidak dapat dilepaskan dengan konsep mandiri, partisipasi, jaringan kerja, dan keadilan. Pada dasarnya, pemberdayaan diletakkan pada kekuatan tingkat individu penyandang cacat dan juga kekuatan sosial, yakni masyarakatnya yang saling mendukung. Hal ini sejalan dengan pandangan Rappaport yang melihat kemandirian sebagai modal utama dalam pemberdayaan berbasis masyarakat ini, dan Mc Ardle yang memandang pemberdayaan dilakukan melalui kemandirian para penyandang cacat dalam rangka mencapai tujuan. Sementara Korten melihat keharusan adanya tingkat partisipasi penyandang cacat dalam konsep pemberdayaan ini. Dan membaurnya penyandang cacat dengan orang normal secara eksplisit telah menciptakan jaringan kerja yang bersifat sinergis. Tentu seluruh proses ini dilandasi oleh keadilan, baik bagi penyandang cacat sendiri maupun masyarakat. Pemberdayaan berbasis masyarakat ini, pada akhirnya akan meningkatkan kemampuan, rasa percaya diri, dan kemandirian penyandang cacat sesuai dengan tingkat kecacatannya, melalui kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan kemampuan fungsional, vokasional, pendidikan dan kemampuan sosialnya. Pada saat yang sama, stigma masyarakat pun hilang dengan sendirinya dan berganti dengan penerimaan penyandang cacat sebagai bagian dari masyarakat, sehingga tidak ada lagi diskriminasi yang dapat menghambat pemberdayaan SDM penyandang cacat ini.

3. Pendekatan *Community Based Research* (CBR)

Community-Based Research (CBR) merupakan salah satu metode penelitian dengan pendekatan berbasis komunitas (*community-based approach*) dan dengan konsekuensi paradigmatik bertumpu pada partisipasi aktif komunitas. Pendekatan ini menekankan peran aktif komunitas dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi hasil riset. Dalam hal ini peneliti berperan utama sebagai fasilitator atau pendamping atau narasumber, yang bersama-sama masyarakat merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program-program riset.

Community-Based Research (CBR) tidak memiliki kekhususan metode yang digunakan, sebab yang menjadi ukuran utamanya adalah kemanfaatan data yang diperoleh bagi masyarakat. Hal ini berarti CBR bisa menggunakan metode pengumpulan data kualitatif, kuantitatif, dan metode-metode lainnya yang relevan dengan konteks penelitian. Jadi metode CBR ditentukan oleh tiga prinsip: a. adanya kolaborasi antara peneliti dan komunitas; b. validasi terhadap pengetahuan yang dimiliki komunitas dan adanya berbagai cara untuk mengumpulkan dan menyebarkan informasi; dan c. adanya perubahan sosial sebagai sarana utama untuk mencapai keadilan sosial atau apapun yang menjadi visi dan cita-cita keinginan masyarakat.

Metode partisipatif (*participatory method*) digunakan untuk memahami kondisi lapangan penelitian secara utuh dan menyeluruh tentang asset sumber daya alam, sumber daya manusia, kondisi sosial, dan lain sebagainya. Metode partisipatif memungkinkan peneliti bersama komunitas secara bersama-sama menganalisis isu yang dihadapi serta ketersediaan asset dan pemanfaatannya dalam komunitas. Hal tersebut dibutuhkan untuk merumuskan perencanaan dan tindakan/aksi untuk menyelesaikan masalah atau untuk menggapai kondisi dan situasi yang diinginkan oleh masyarakat. Tujuan menggunakan metode partisipatif dalam *Community-Based Research* (CBR) dikarenakan seluruh kegiatan proses penelitian melibatkan partisipasi komunitas.

4. Pelaksanaan Program Pemberdayaan

Terdapat 3 program kegiatan yang dilaksanakan yaitu:

a. *Preliminary research*

Dalam program ini yang dilakukan oleh peneliti adalah *Mapping* potensi, permasalahan, tantangan masyarakat miskin penyandang *disabilitas*. Dalam kegiatan ini melalui metode *Participatory Rapid Appraisal* seluruh *stakeholder* masyarakat dampingan melakukan *survey* lingkungan sendiri. Dari hasil kegiatan *mapping* tentang data penyandang

disabilitas di Kabupaten Ponorogo diketahui bahwa penyandang *disabilitas* tersebar dalam 5 wilayah, yaitu desa Krebet dan desa Sidoharjo di wilayah Kecamatan Jambon, desa Karangpatihan dan desa Pandak di wilayah kecamatan Balong, dan desa Dayakan di wilayah kecamatan Badegan. Karena wilayah yang begitu luas, maka tim pengabdian masyarakat hanya membatasi 1 wilayah yaitu desa Krebet. Pada tahap ini ada 2 hal yang dilakukan yaitu pengenalan terhadap komunitas dampingan dan mengorganisir *stakeholder* yang berada di sekitar komunitas dampingan.

1) Pengenalan terhadap komunitas dampingan.

Jumlah penyandang *disabilitas* di desa Krebet adalah 134 orang *disabil*, dimana 134 orang tersebut mengalami kecacatan yang berbeda-beda. Penyandang *disabilitas* yang dapat diikutsertakan program pemberdayaan masyarakat ini adalah hanya penyandang *disabilitas* dengan usia produktif dengan kategori tingkat kecacatan ringan. Dari 134 orang *disabil*, hanya ditemukan 15 orang *disabil* yang bisa diberdayakan dan sanggup untuk mengikuti program-program yang akan diselenggarakan. Sedangkan yang tidak sanggup mengikuti program, maka keluarganya yang normal dilibatkan dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga.

2) Pemetaan *Stakeholder*

Selain melakukan *mapping* terhadap data penyandang *disabilitas* (orang dengan kecacatan), tim pengabdian juga melakukan *mapping* terhadap pihak-pihak (*stakeholder*) yang dapat dilibatkan dalam pemberdayaan masyarakat miskin penyandang *disabilitas* di desa Krebet Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo. *Mapping* terhadap pihak-pihak lain ini bertujuan untuk mempermudah pelaksanaan, keberhasilan dan keberlanjutan program pemberdayaan yang dilaksanakan oleh tim pengabdian.

Semua *stakeholder* pada dasarnya dekat dengan para penyandang *disabilitas*, sehingga mereka semua dapat dilibatkan untuk bersama-sama memberikan pendampingan kepada para *disabil*. Masing-masing *stakeholder* mempunyai peran yang berbeda dan saling keterkaitan sebagai berikut:

- a) Petani ladang berperan dalam menyediakan bahan baku ketela bagi komunitas dampingan.
- b) PKK adalah sebuah organisasi masyarakat yang berperan secara langsung sebagai pendamping dan pelaku dari program pemberdayaan ini.

- c) Ulama dimana keberadaannya mempunyai peran sebagai motivator kerohanian, yang diperlukan oleh komunitas dampingan untuk menumbuhkan motivasi dan kepercayaan diri.
- d) Pemerintah perannya sebagai regulator dan fasilitator dalam program pemberdayaan ini sehingga program ini dapat berkelanjutan.
- e) Karangtaruna merupakan organisasi pemuda desa yang mempunyai peran sebagai pendamping, pelaku dan pengembang dari program pemberdayaan ini.
- f) Pedagang berperan sebagai pelaku pemasaran serta penyedia sarana pemasaran produk dari program pemberdayaan ini.
- g) BLK (Balai Latihan Kerja) berperan sebagai pemberi pelatihan dan ketrampilan bagi komunitas dampingan.
- h) LSM sebagai pemberi dampingan pada masyarakat penyandang disabilitas.
- i) Guru atau pegawai sebagai motivator serta pendidik bagi komunitas dampingan.
- j) Akademisi (Perguruan Tinggi) menerapkan Tri Darma Perguruan Tinggi yaitu pengembangan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat bidang ekonomi kreatif.

Dari berbagai peran yang berbeda dari para *stakeholder* tersebut, diharapkan terdapat pemahaman yang lebih komprehensif dari masing-masing pihak agar tercipta kolaborasi yang saling menguntungkan, sehingga para *stakeholder* tersebut akan lebih meningkatkan perannya, sebagai penggerak utama industri kreatif terutama pada limbah singkong menjadi kripik singkong.

b. Pelaksanaan Program Pemberdayaan

Kegiatan pelaksanaan program dilaksanakan selama 4 hari, yaitu:

1) Tanggal 24 oktober 2015

Diisi dua pemateri, yaitu: a) Motivasi kewirausahaan oleh ketua Tim Pengabdian, dan b) Teoritik Pengenalan Singkong dan Kulitnya, manfaat dan kandungan gizi di dalamnya, pengenalan macam-macam bahan makanan dari kulit singkong dan bahan makanan dari singkong oleh Tim BLK.

2) Tanggal 25 oktober 2015

Diisi dengan pelatihan pembuatan makanan orak arik dari kulit singkong dan pelatihan pembuatan kue dari singkong oleh Tim BLK didampingi Tim Pengabdian.

3) Tanggal 26 oktober 2015

Diisi dengan pembuatan jamilan stik kulit singkong dan lanjutan pelatihan pembuatan kripik kulit singkong dari tim BLK didampingi Tim Pengabdian.

4) Tanggal 27 oktober 2015

Diisi dengan lanjutan pelatihan pengemasan camilan stik kulit singkong dan lanjutan pelatihan pengemasan kripik kulit singkong dari Tim BLK didampingi Tim Pengabdian. Serta pelatihan manajemen pemasaran dan pelatihan penghitungan estimasi biaya produk dari Tim Pengabdian.

c. Follow Up Program Pemberdayaan

Agar program pemberdayaan ini bisa terus berjalan dan dapat dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat penyandang *disabilitas*, maka dibentuklah kelompok usaha mandiri dengan nama “Kelompok Usaha Mandiri Sejahtera” di kecamatan Jambon. Kelompok ini dengan perantara tim pengabdian membuat kerjasama bidang pemasaran dengan KADIN Ponorogo, kelompok UMKM Ponorogo, dan Wisata Kuliner Ponorogo.

5. Analisis Pemberdayaan Masyarakat Miskin Penyandang Disabilitas dengan Menggunakan Metode CBR.

Bentuk pemberdayaan masyarakat miskin penyandang *disabilitas* yang dilakukan oleh Tim Pengabdian adalah:

- a. Penyusunan program pemberdayaan masyarakat dengan *stakeholder*.
- b. Program pelatihan ekonomi kreatif pembuatan makanan dari “limbah singkong” beserta produk kreatif berbahan singkong.
- c. Program pelatihan akuntansi untuk UKM Manufaktur (UKM Produksi).

Dalam hal ini, apa yang dilakukan oleh tim pengabdian beserta masyarakat sudah sesuai dengan kriteria *Community Based Research* (CBR). Syarat mutlak yang harus ada dalam penelitian CBR, antara lain:

a. Relevan dengan kehidupan masyarakat

Penelitian mempunyai keterkaitan dengan kepentingan masyarakat termasuk isu-isu praktis yang sering dihadapi dan selalu dibingkai dalam konteks masyarakat. Penelitian CBR harus terkait dan dapat dijadikan modal bagi perubahan perbaikan kehidupan masyarakat. Penelitian harus aplikatif dan hasilnya dapat dirasakan serta bermanfaat bagi masyarakat.

b. Partisipatoris

Adanya kerja sama dalam melakukan setiap tahapan penelitian mulai dari rancangan penelitian sampai diseminasi. Peran dari berbagai pihak, baik dari kalangan akademik ataupun masyarakat bersifat resiprokal; timbal balik yang saling menguntungkan. Sebagai bentuk partisipatori, para peneliti baik dari kalangan akademisi maupun yang berasal dari komunitas harus diberi peran yang setara. Peran ini merujuk pada asas partisipatoris yang dibangun dalam penelitian CBR. CBR lebih mementingkan hasil yang bermanfaat bagi perubahan komunitas.

c. Berorientasi pada tindakan

Proses penelitian yang dilakukan dengan cara kolaboratif-partisipatoris berujung pada adanya perubahan positif yang membawa manfaat yang bisa dirasakan oleh masyarakat dan mendorong terwujudnya kesetaraan sosial.¹⁴ Karenanya, CBR lebih menginginkan adanya rumusan-rumusan tindakan nyata dalam penelitian.

6. Faktor Pendorong dan Penghambat dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Penyandang Disabilitas

Faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat miskin penyandang disabilitas di Kabupaten Ponorogo antara lain:

a. Kurangnya hubungan dengan masyarakat luar

Masyarakat yang kurang melakukan hubungan dengan masyarakat luar dapat menyebabkan kurangnya mendapat informasi tentang perkembangan dunia. Hal ini mengakibatkan masyarakat tersebut terasing dan tetap terkurung dalam pola-pola pemikiran yang sempit dan lama.

b. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terlambat

Jika suatu masyarakat kurang melakukan hubungan dengan masyarakat luar, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada masyarakat tersebut menjadi lambat. Hal ini disebabkan mereka kurang atau belum menerima informasi tentang kemajuan masyarakat lain.

c. Sikap masyarakat yang tradisional

Ada sebagian masyarakat yang masih mempertahankan tradisi dan menganggap tradisi tak dapat diubah secara mutlak, dapat mengakibatkan terhambatnya

¹⁴ Joanna Ochocka, *Community Based Research*, disajikan dalam Advanced CBR Training (Surabaya: SILE/LLD UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014), 25-29 Agustus.

perubahan sosial dalam masyarakat tersebut. Hal ini disebabkan masyarakat tak bersedia menerima inovasi dari luar. Padahal, inovasi tersebut merupakan salah satu faktor yang dapat mendorong terjadinya perubahan yang diharapkan dalam suatu masyarakat.

d. Ketergantungan (*depedence*).

Ketergantungan suatu komunitas terhadap orang lain (misalnya terhadap pendamping sosial) menyebabkan proses “pemandirian” masyarakat membutuhkan waktu yang cenderung lebih lama. Selama ini masyarakat penyandang *disabilitas* di Kabupaten Ponorogo sering mendapatkan bantuan dari luar yang bersifat konsumtif. Sehingga hal ini menyebabkan masyarakat kurang mandiri dan menimbulkan ketergantungan terhadap pihak lain.

e. Rasa tidak percaya diri (*self distrust*)

Rasa tidak percaya diri membuat seseorang tidak yakin dengan kemampuannya sehingga sulit untuk menggali dan memunculkan potensi yang ada pada dirinya. Hal ini membuat orang menjadi sulit berkembang karena ia sendiri tidak mau berkembang sesuai dengan potensi yang dimilikinya.

Faktor-faktor pendorong terhadap keberhasilan dalam pemberdayaan masyarakat penyandang *disabilitas* di Kabupaten Ponorogo antara lain:

a. Sikap keterbukaan terhadap orang lain

Masyarakat dan keluarga penyandang *disabilitas* sangat terbuka dan *welcome* terhadap orang luar yang akan melakukan pemberdayaan demi untuk perubahan menuju ke kondisi yang lebih baik.

b. Dukungan dan Partisipasi dari semua stake holder

Dengan adanya dukungan dari semua *stakeholder* yang dilibatkan sangat kuat, maka pemberdayaan masyarakat penyandang *disabilitas* sangat mudah dilakukan.

Komunitas bukan kumpulan orang yang homogen, namun terdiri dari berbagai individu yang mempunyai masalah dan kepentingan sendiri. Oleh karenanya, keterlibatan semua golongan yang ada di komunitas adalah sangat penting. Golongan yang paling diperhatikan justru yang paling sedikit memiliki akses dalam kehidupan sosial komunitasnya (kelompok marjinal seperti orang miskin, perempuan, anak-anak, penyandang *disabilitas*, orang lanjut usia, dan lain-lain). Komunitas heterogen memiliki pandangan pribadi dan golongan yang berbeda. Oleh karenanya semangat untuk saling menghargai perbedaan

tersebut adalah penting artinya. Yang terpenting adalah pengorganisasian masalah dan penyusunan prioritas masalah yang akan diputuskan sendiri oleh komunitas sebagai pemiliknya. Kegiatan penelitian partisipatif dilaksanakan dalam suasana yang luwes, terbuka, tidak memaksa, dan informal. Situasi santai tersebut akan mendorong tumbuhnya hubungan akrab, karena orang luar akan berproses masuk sebagai anggota, bukan sebagai tamu asing yang harus disambut secara protokoler. Dengan demikian suasana kekeluargaan akan dapat mendorong kegiatan penelitian partisipatif berjalan dengan baik.

C. PENUTUP

Pemberdayaan terhadap masyarakat lemah hendaknya terus dilakukan, agar kemandirian dan kesejahteraan hidup bagi masyarakat miskin penyandang *disabilitas*, terutama masyarakat yang keluarganya mengalami cacat mental atau cacat yang lainnya dapat terwujud. Adanya pembinaan dan dukungan dari pemerintah daerah dan instansi terkait terhadap wirausaha-wirausaha masyarakat miskin penyandang. Pemberdayaan ini ditujukan untuk kelompok masyarakat yang lemah yaitu masyarakat miskin penyandang *disabilitas*, agar dapat mandiri dan tidak menjadi beban orang lain. penyandang *disabilitas* yang dapat diikutsertakan program pemberdayaan masyarakat ini adalah hanya penyandang *disabilitas* dengan usia produktif dengan kategori tingkat kecacatan ringan.

Pelaksanaan kegiatan program pengabdian masyarakat yang dispesifikasikan pada upaya pemberdayaan masyarakat miskin penyandang *disabilitas* melalui peningkatan *life skill* berbasis potensi daerah dengan pengembangan industri kreatif “limbah singkong”, dengan menggunakan metode partisipatif (*participatory method*) dalam *community based research (CBR)*. Pendekatan ini menitikberatkan peran aktif komunitas dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi hasil riset. Dalam hal ini, tim pengabdian (peneliti) berperan utama sebagai fasilitator atau pendamping atau narasumber yang bersama-sama masyarakat merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program-program riset. Tujuan menggunakan metode partisipatif dalam *Cummunity Based Research (CBR)* adalah seluruh kegiatan penelitian melibatkan partisipatif komunitas dampingan, sesuai atau relevan dengan kebutuhan masyarakat dan berorientasi pada tindakan.

DAFTAR PUSTAKA

Adam, Felix. (Online), <http://www.pu.go.id/P2KP/2006>.

BPS Kabupaten Ponorogo tahun 2014.

C., Swift and G. Levin. "*Empowerment: An Emerging Mental Health Technology*", *Journal of Primary Prevention*. USA: t.p., 1987.

<http://www.kemeninkom.co.id>.

<http://www.pemberdayaan.com/etcetera/energi-sosial-budaya-dan-lokalitas-titik-fokus-konsep-pemberdayaan.html#more-86>, diakses 10 Agustus 2010.

<http://www.pemberdayaan.com/pemberdayaan/konsep-pemberdayaan-membantu-masyarakat-agar-bisa-menolong-diri-sendiri.html#more-82>, diakses 15 Agustus 2010.

Ife, Jim. *Community Development: Creating Community Alternatives, Vision Analysis and Practice*. Australia: Longman, 1995.

Jemiran. *Wawancara*, Krebet, 10 September 2015.

Ochocka, Joanna, *Community Based Research*, disajikan dalam Advanced CBR Training. Surabaya: SILE/LLD UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014. 25-29 Agustus.

Parsons, Ruth J., James D. Jorgensen and Santos H. Hernandez. *The Integration of Social Work Practice*. California: Wadsworth Inc, 1994.

Rappaport, J. *Studies in Empowerment: Introduction to the Issue, Prevention in Human Issue*. USA: t.p., 1984.

Todaro, M. P. *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga*, Edisi VI. Jakarta: Erlangga, 1999.